



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PELAYANAN PUBLIK  
KOMISI II DPR RI  
DI KABUPATEN SLEMAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018-2019  
TANGGAL 15 NOVEMBER 2018**

---

### **I. Pengantar**

Dalam upaya melakukan kunjungan reses di Kabupaten Sleman maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Sleman, adapun kunjungan tersebut untuk melihat sejauhmana proses pemerintahan, terkait pelayanan publik, dan permasalahan pemerintahan. Kunjungan diawali meninjau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman, kunjungan tersebut untuk meninjau sekaligus membahas persoalan pelayanan publik dilakukan di Kantor DPMPPT Kabupaten Sleman. Setelah kunjungan tersebut dilanjutkan pertemuan di Kantor Bupati Sleman di Kota Sleman untuk membahas masalah pelayanan publik dan permasalahan lain yang terkait pelayanan seperti, perekaman KTP el, rekrutmen PNS, dan pelayanan pemerintah desa.

### **II. Hasil Kunjungan**

#### **Hasil Kunjungan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman**

Pertemuan di Kantor DPMPPT Kabupaten Sleman di Kota Sleman, untuk mendapat penjelasan dari Kepala DPMPPT Sutadi Gunarto, SH, MHum terkait perkembangan pelayanan publik.

PELAYANAN PERIZINAN PASCA  
TERBIT PP 24 TAHUN 2018  
DI KABUPATEN SLEMAN

DMPPT KAB. SLEMAN TIDAK  
MENGELUARKAN IZIN YANG TERDAPAT  
DALAM LAMPIRAN PP 24/2018

MELAKSANAKAN PENDAMPINGAN  
TERHADAP PELAKU USAHA YANG  
MENDAFTAR LEWAT OSS.GO.ID

SEBELUM PP 24 TAHUN 2018 TERBIT  
DASAR HUKUM DMPPT KAB. SLEMAN :

1. Perda Kab. Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman
2. Perbup Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DMPPT
3. Perbup Sleman Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Izin

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN IZIN  
SESUAI PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2018 :

- 35 Jenis izin yang diselenggarakan DMPPT dari 89 izin di Kab. Sleman
- Setelah PP 24 Tahun 2018 izin yang diselenggarakan ada 5 jenis izin : IPPT, RTB, IMB, Reklame, Penyelenggaraan Pemondokan

Online Single Submission  
( OSS )

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara  
Elektronik

Dasar Hukum :

1. Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
2. PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

## Dasar Hukum Percepatan Berusaha Pemkab Sleman

Keputusan Bupati Sleman Nomor 133.5 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Sleman

OSS  
dapat diakses melalui [oss.go.id](http://oss.go.id)

Dengan 4 (empat) sisi yang berbeda :

- 1. Pelaku Usaha
- 2. Satuan Tugas (Setda)
- 3. PTSP (DPMPPPT)
- 4. Help Desk

LEMBAGA OSS atas nama Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota mengeluarkan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Izin Usaha
3. Izin Kemersial atau Operasional

Permasalahan PTSP (kasus di Sleman) yang dihadapi :

- 1. Pemenuhan Komitmen, di Notifikasi ada komitmen tapi di PTSP tidak ada list komitmen.
- 2. Pemohon tidak melakukan centang komitmen apapun tapi izin sudah berlaku efektif.
- 3. Untuk Badan Usaha Persekutuan tidak ada pilihan.
- 4. Jika perusahaan sudah punya NIB, ingin menambah KBLI harus mencabut NIB

5. Rekap Laporan untuk izin di OSS belum tersedia.
6. Pembagian hak akses/petugas yang memverifikasi komitmen, belum tersedia berdasarkan jenis izin

TERIMA KASIH

### **Hasil Pertemuan Dengan Bupati Sleman**

Pertemuan diawali dengan sambutan oleh Wakil Bupati Sleman Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes yang dilanjutkan perkenalan dengan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Ketua Tim Kunspek Dr. Mardani Ali Sera, MEng dan perkenalan anggota tim Kunspek Komisi II DPR RI. Perkenalan tersebut dilanjutkan tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Tim Kunspek.

Dr. H. Azikin Sulthan

Bagaimana Implementasi reformasi birokrasi dan terkait rekrutmen CPNS kemarin yang ternyata tidak banyak yang lolos *passing grade*, dan akan dilakukan peringkinan kata menpan, bagaimana tanggapan ibu wakil ?

Drs. H. Tamanuri, MM

Bagaimana dengan perkembangan Dana desa di Sleman karena rencana pemerintah pada tahun 2019 akan menyentuh 70 Trilyun. Tentu kalau itu berlangsung baik maka akan ada pengaruh pada ekonomi di desa sehingga akan menuju desa mandiri, dan dapatkan mengurangi pengangguran di desa?

Drs. Sirmadji,MPd

Kita senang dengan pegawai honor atau pegawai harian lepas di DPMPTP mendapatkan honor sesuai UMR. Rencana pemerintah akan membuka PPPK, terakhir kalau tidak lolos juga baru jadi honorer daerah. Bagaimana sekolah untuk menggaji para guru apakah sesuai UMR. bagaimana izin galian c pindah ke pemprov sehingga membuat kelangkaan bahan bangunan, karena susahnya izin. Apakah izin HO sudah tidak diperlukan lagi, apakah hal tersebut menjadi masalah di Sleman karena ada kejadian di Semarang izin rumah makan di samping kolam renang, ternyata mengurangi pengunjung kolam renang, ini efek dari izin HO yang dicabut sehingga usaha tidak perlu izin dari lingkungan?

Sutriyono, SPd, MSi

Mempelopori pelayanan era *e government* karena banyaknya sdm kampus sehingga selanjutnya Sleman menjadi terdepan. Apalagi menyongsong perdagangan dunia yang semakin maju, saya yakin Sleman akan juga semakin maju. Untuk pelayanan sebaiknya juga sudah terdigitalisasi. Seperti misalnya arsip di DMPTP belum terjadi digitalisasi

Sareh Wiyono, SH, MH.

Apakah ada kesulitan pelaksanaan Program PTSL, bagaimana peran ORI dalam pengawasan pelayanan publik dalam PTSL

Drs. Abdul Hakam Naja, MSi

Apakah belum ada jawaban, untuk gov dan reformasi birokrasi

Ahmad Baidhowi, Ssos, MSi

Inovasi dalam pelayanan publik, seperti e budgeting village di Banyuwangi, bagaimana pelayanan e ktp di kab sleman.

Firman subagio, SE, MH.

Moratorium pembangunan perhotelan, karena banyak investor ingin membangun hotel, bisnis kos2an. Bagaimana pengawasan mutu bangunan arena daerah rawan gempa. Pelayanan baik harus ada sosialisasi pada masyarakat,

Banyak OTT KPK sudah sampai pelayanan publik, karena mungkin ada pelaporan dari orang dalam karena ada pengawasan yang tidak baik.

Dr. Mardani, MEng

Seberapa jauh peran KPK mensupervisi pelayanan publik, sehingga memenculkan zona integritas di Kab Sleman

Jawaban Pemerintah Kabupaten Sleman

Penerimaan CPNS di Kabupaten Sleman terdapat kurang lebih 5000 pendaftar, sedangkan lowongan sebanyak 628 lowongan dapat diisi karena padahal kita minta 1200 lowongan ke pusat, sedangkan yang lulus passing grade kurang lebih 400. Kita berharap nanti bila ada surat Menpan RB, maka bila ada perangkanan maka jangan sampai yang lolos passing grade tidak lolos karena mereka peserta terbaik itu harapan kita.. Untuk tenaga honorer kita menunggu PP P3K, untuk menyelesaikan masalah honorer. Terkait sistem merit, sejak tahun 2016 pejabat tinggi di Sleman telah dilakukan lelang jabatan, untuk sekda, dan kadinas, kita selalu berkomunikasi KASN.

Dr. Mardani, MEng

Kemarin berdasarkan informasi yang kami terima yang lolos passing grade langsung lolos, hanya saja karena lowongan masih banyak kosong maka untuk mengisinya dilakukan dengan cara memeringkat peserta yang telah melakukan tes.

Jawaban Pemerintah Kabupten Sleman

Kemudian terkait dana desa sekarang telah turun 86 milyar, dan untuk pengaturan dengan ABPDes, dan dimulai dengan murenbang desa. Untuk BUMDES dan padat karya membantu ekonomi desa, untuk pelaporan dana desa secara di Sleman sudah berbasis IT, sehingga bisa dilihat secara online.

Sebelumnya ada 24 BUMDES dengan dana desa maka sekarang ada 35 BUMDES, BUMDES terpadu dengan sistem SIMPADU untuk memotivasi BUMDES yang belum berkembang. Ada 35 000 umkm bisa terintegasi dengan BUMDES sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Terkait PTSL, tidak ada masalah namun sebenarnya butuh biaya dan masyarakat tahunya hal tersebut gratis dari pemerintah , sehingga kita beban khawatir kena OTT KPK,

E KTP tidak ada penunggakan kami satu dari 12 kab/kota yang tidak mengalami penundaan. Untuk melancarkan semua itu. kita menggunakan pemutakhiran data secara mandiri. Misalnya ada pemakaman maka langsung akta kematian turun. Masalah dalam e ktp adalah terkait dengan blangko yang disediakan oleh pemerintah. Kalau ada blangko tentu kita langsung cetak.

Terkait Adminduk, perekaman ktp el 98% terkait pencetakan tergantung oleh kemendagri, kami siap cetak dan 17 kecamatan. Inovasi lukadesi sleman, staf desa

akan memberikan akta kematian dan demikian juga akta kelahiran, yang repot adalah pegawai bukan masyarakat.

Untuk masalah Pariwisata, moratorium perhotelan belum bisa dicabut karena ada alih fungsi lahan di Sleman sebanyak 105 ha pertahun. Dan masyarakat di sini kurang sreg dengan bangunan keatas karena pernah terjadi gempa besar di Yogyakarta tahun 2006

Saat ini hanya 31% rumah warga masyarakat yang memiliki IMB, untuk mendorong itu maka sekarang punya perbup untuk dispensasi IMB, kami menggunakan semua media agar dalam 3 tahun semua rumah di Sleman ter IMB. E government, untuk arsip, maka untuk arsip IMB maka perlu peralatan yang canggih. Perizinan hotel, terkait RTRW jadi kami patuh untuk moratorium.

Selanjutnya pengembangan E gov, kita udah mengadakan rapat bersama, dan ada kajian membuat mall perizinan, sehingga buat SIM, KTP, perpanjangan STNK, PTSP, sehingga satu orang datang dapat banyak melakukan izin di satu tempat, insya Allah sesuai target kabupaten Sleman maka tahun 2021 terealisasi.

Terkait e gov, Kabupaten Sleman memiliki 37 Tenaga Ahli IT untuk meminimalisir peran pihak ke 3, Sehingga kita bisa mengembangkan aplikasi sendiri, semua data OPD terkumpul di server dinas kominfo. Integrasi layanan ada Sleman dash board, data pajak daerah, retribusi, data ASN bisa diakses.

Data berasal dari kependudukan dan tapi kita belum bisa mengakses data penduduk kabupaten lain. Kerjasama dengan PT, satu ini, untuk pengembangan smart city, agar kami tetap mengetahui teknologi terbaru. Dan dengan IT 4 G Sleman telah ada space dalam untuk enterpreuner teknologi.

Untuk persoalan Izin HO, tidak berlaku lagi tapi memang di Sleman baik-baik, tetapi ada pemantuan dan pengawasan dari petugas UPL.

Untuk masalah izin galian c memang di provinsi, akan tetapi maka warga Sleman tidak masalah, karena kita tetap menjadi supplier untuk luar daerah, dengan pasir dari Gunung Merapi, dan sungai Progo

ORI Perwakilan DIY

Bahwa secara umum laporan masyarakat Sleman hanya 10% dari seluruh laporan masyarakat DIY yang masuk ORI. Selanjutnya kami saat ini sedang memantau izin Toko Jejaring di Sleman seperti Alfa Mart, kita minta ditertibkan, termasuk tower BTS. Kemudian Perizinan hotel, pada umumnya masyarakat ingin terlibat tapi terkendala dengan adanya penghapusan izin HO, maka mereka terganggu, misalnya air tanah, religilitas.

Komisiner ORI Prof. Dr Adrianus Meliala, MA

Sepanjang pengamat kami OSS memang membikin repot, karena mengganggu otonomi daerah, yang harusnya bisa diskresi tapi kemudian terasa ditarik ke pusat. Jadi seakan mengurangi otonomi daerah. Terkait DPMTSP, memang satu pintu tapi masalahnya banyak jendela, sehingga menjadi masalah karena sebagian izin adalah wewenang pusat, seperti paspor. Ini kendala Mall perizinan. Untuk Kabupaten Sleman tahun 2017 masih kriteria kuning, dan tahun 2018 bisa hijau.

Jawaban Pemerintah Sleman

Kita punya kanal untuk melaporkan pelayanan, dan banyak yang lapor. Dan semua dipaparkan setiap senin untuk membuka laporan masyarakat dengan OPD.

### **III. Penutup**

Acara ditutup oleh Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Kabupaten Sleman Dr. H. Mardani Ali Sera, MEng. Dan meminta Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan OSS serta terus meningkatkan profesionalitas ASN dalam pelayanan publik agar masyarakat merasa memiliki negeri ini.